

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan perizinan usaha pertambangan pasir di Kabupaten Sarolangun; serta bentuk pengawasan perizinan usaha pertambangan pasir di Kabupaten Sarolangun. Jenis penelitian adalah yuridis empiris yaitu penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan dengan jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kewenangan perizinan usaha pertambangan pasir di Kabupaten Sarolangun dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi Jambi yang dalam hal teknis diselenggarakan oleh DPMPTSP Provinsi Jambi dalam bentuk kewenangan delegatif berupa penyelenggaraan perizinan, seperti penerbitan izin bagi usaha tambang pasir dan kewenangan terhadap aspek pengusahaan dari tambang pasir tersebut sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Bentuk pengawasan perizinan usaha pertambangan pasir di Kabupaten Sarolangun berupa pengawasan secara represif dengan cara memberikan sanksi administrative berupa peringatan tertulis, denda, penghentian sementara atau sebagian seluruh kegiatan pertambangan, serta pencabutan SIPB. Namun pengawasan ini kurang berjalan dengan optimal karena belum adanya sanksi tegas bagi perusahaan yang melanggar izin karena belum adanya pengaturan yang jelas terkait kewenangan pengawasan antara DPMPTSP Provinsi Jambi dengan inspektur tambang. Dari hasil penelitian ini perlu adanya pengaturan lebih lanjut terkait dengan pengawasan represif terhadap usaha pertambangan pasir, sehingga DPMPTSP bisa menerapkan aturan tersebut dan pengawasan dapat berjalan dengan optimal, serta pengaturan terkait dengan kewenangan yang dimiliki DPMPTSP terkait penyelenggaraan perizinan bersifat delegatif.

Kata kunci: pengawasan, perizinan, usaha pertambangan pasir

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine and analyze the authority of sand mining business licensing in Sarolangun Regency; as well as the form of supervision of sand mining business licensing in Sarolangun Regency. The type of research is empirical juridical, namely sociological legal research or field research with the types and sources of data used are primary and secondary data obtained through interviews and documentation. The results of the study indicate that the the form of authority for sand mining business licensing in Sarollangun Regency is carried out by the regional government of Jambi Province which in terms of technical matters is organized by the Jambi Province DPMPTSP in the form of delegated authority in the form of licensing, such as issuing permits for sand mining businesses and authority over aspects of the sand mining business in accordance with the provisions of laws and regulations. The form of supervision of sand mining business licensing in Sarollangun Regency is in the form of repressive supervision by providing administrative sanctions in the form of written warnings, fines, temporary or partial suspension of all mining activities, and revocation of SIPB. However, this supervision is not running optimally because there are no strict sanctions for companies that violate permits because there are no clear regulations regarding the supervisory authority between the Jambi Province DPMPTSP and mining inspectors. From the results of this study, there needs to be further regulation related to repressive supervision of sand mining businesses, so that DPMPTSP can implement these regulations and supervision can run optimally, as well as regulations related to the authority held by DPMPTSP regarding the implementation of licensing are delegated.

Keywords: supervision, licensing, sand mining business